



Seri Hidayu¹
 Mira Santika Miranda²
 Khairunnisa³
 Joni Hendra⁴

STABILITAS EKONOMI DAN TINGKAT PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Abstrak

Stabilitas ekonomi di suatu daerah menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi daerah yang sedang berkembang. Kabupaten Bengkalis, sebagai bagian dari Indonesia, menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, salah satunya adalah inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Data APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yaitu sebesar 4,1 T dimana pendapatan daerah sebesar Rp3.626.160.805.381, Belanja Daerah Rp4.135.901.040.461 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp509.740.235.080 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp539.740.235.080 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000. Berdasarkan data dari pendapatan Kabupaten Bengkalis, maka penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bengkalis tertuang dalam Belanja daerah yang didalam APBD diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Stabilitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara permintaan domestik dan pengeluaran domestik, tabungan, serta investasi. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan daerah dan pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran daerah yang efisien dan transparan, serta penguatan sektor industri dan jasa, sangat penting dalam mewujudkan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.

Kata Kunci: Stabilitas Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Bengkalis, Pembangunan Ekonomi

Abstract

Economic stability in a region is an important factor in improving community welfare, especially for developing regions. Bengkalis Regency, as part of Indonesia, faces complex economic challenges, one of which is inflation which affects people's purchasing power and overall economic growth. Bengkalis Regency APBD data for 2024 is 4.1 T where regional income is IDR 3,626,160,805,381, Regional Expenditure IDR 4,135,901,040,461 and Regional Financing is IDR 509,740,235,080 consisting of financing of IDR 539,740,235,080 and financing expenditure amounting to IDR 30,000,000,000. Based on Bengkalis Regency income data, the use of the regional income and expenditure budget in Bengkalis Regency is contained in the regional expenditure in the APBD which is directed at supporting government administration, community development and training. Economic stability in Bengkalis Regency can be achieved by maintaining a balance between domestic demand and domestic spending, savings and investment. In addition, Regional Original Income (PAD) is the main source of funding for regional development and government management. Therefore, efficient and transparent regional budget management, as well as strengthening the industrial and service sectors, are very important in realizing sustainable economic stability in Bengkalis Regency.

Keywords: Economic Stability, Regional Original Income, Bengkalis Regency, Economic Development

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
 email:srihdyu@gmail.com¹, mirasantikamiranda94@gmail.com², khairunnisaaaa19@gmail.com³, joniqizel77@gmail.com⁴

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi suatu negara menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, masalah stabilitas ekonomi merupakan masalah yang terus ada, terutama bagi negara-negara berkembang. Hampir setiap negara, terlepas dari status pembangunannya, menghadapi tantangan terkait stabilitas pertumbuhan ekonomi. Inflasi telah menjadi perhatian utama di setiap negara. Sebagai negara berkembang, stabilitas ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sistem moneter dan ekonomi global, yang secara konsisten menghadapi masalah ini. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Permintaan domestik, pengeluaran, tabungan, dan investasi yang seimbang akan menghasilkan stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, perkuat ketahanan ekonomi domestik terhadap guncangan (Legesang et al., 2021).

Semua negara mengutamakan stabilitas ekonomi. Ekonomi yang tidak stabil di suatu negara menyebabkan pertumbuhan yang lemah, pengangguran yang tinggi, dan inflasi yang tinggi. Ekonomi makro mengkaji ekonomi secara keseluruhan, di mana elemen-elemen yang saling terkait berkontribusi terhadap pelestarian stabilitas ekonomi. Suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel-variabel ekonomi makro. Variabel-variabel ekonomi makro ini membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Setelah menganalisis hubungan antara instrumen-instrumen ekonomi makro, pemerintah (otoritas moneter) dapat membuat kebijakan-kebijakan ekonomi makro (Maria dkk, 2021).

Stabilitas ekonomi sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan nasional yang berkualitas. Stabilitas ekonomi bergantung pada keseimbangan ekonomi makro.

Perekonomian Indonesia dicirikan oleh ketidakstabilan, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk inflasi tinggi, yang biasanya diakibatkan oleh krisis global, salah urus, produksi yang tidak mencukupi, dan perubahan struktur ekonomi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang penting, dan berbagai upaya terus dilakukan untuk mempertahankan tingkat perubahan yang rendah dan stabil guna mencegah masalah ekonomi makro yang selanjutnya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang dan jasa secara umum naik seiring waktu. Kenaikan ini akan menurunkan daya beli individu, hasil produksi, dan pendapatan nasional. Pendapatan nasional turun karena ketidakpastian ekonomi (Maryanti dkk, 2019).

Penelitian ini mengkaji stabilitas ekonomi Kabupaten Bengkalis dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan daerah dan stabilitas perekonomian dalam rangka pembangunan daerah, serta memberikan informasi yang berharga kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bengkalis, dalam rangka perumusan kebijakan ekonomi guna mendukung stabilitas perekonomian daerah.

METODE

Tinjauan ini menggunakan pendekatan pencarian Internet, yang melibatkan tindakan mengambil data daring untuk mengumpulkan informasi dari referensi, jurnal, publikasi, atau undang-undang daring yang relevan dengan subjek penelitian.

Sumber Data (Data Sekunder)

Data sekunder berasal dari pihak ketiga, termasuk artikel jurnal atau hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku perpustakaan, buku elektronik, jurnal, dan sumber lain yang terkait dengan masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep strategi

Strategi berasal dari "strategos," dari "stratus," yang berarti militer. Perencanaan strategis melibatkan para pemimpin senior yang membuat rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Strategi organisasi mencakup tujuan, kebijakan, rencana tindakan, keputusan, dan alokasi sumber daya.

Menurut David (2011), para eksekutif puncak membuat strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi dan mengembangkan metode untuk mencapainya. Sondang (2001)

mencatat bahwa strategi berasal dari kata Yunani *strategia*, yang berarti seni atau ilmu komando pasukan. Mengalokasikan dan menggunakan kekuatan militer secara strategis untuk mencapai tujuan juga disebut strategi.

Konsep Stabilitas Ekonomi

Keseimbangan atau stabilisasi adalah kestabilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pertumbuhan ekonomi yang kuat dibangun atas kestabilan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Permintaan domestik, pengeluaran, tabungan, dan investasi yang seimbang akan mengarah pada kestabilan ekonomi. Pertumbuhan yang berkelanjutan bergantung pada kestabilan ekonomi makro.

Stabilitas ekonomi sangat penting karena tindakan pemerintah menjaga harga barang dan jasa tetap stabil, memastikan kepastian bisnis. Inisiatif penguatan sektor keuangan yang mempercepat operasi ekonomi meningkatkan stabilitas ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan sektor keuangan sebagai penyandang dana pembangunan. Kebijakan sektor keuangan berupaya untuk memperkuat industri jasa keuangan, meningkatkan intermediasi uang publik, dan menciptakan jaring pengaman (Fajriansyah dkk, 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, daerah memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah meliputi semua pendapatan daerah yang dihimpun di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah (Halim, 2004). Pendapatan Asli Daerah dikembangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 3, mengatur tentang perimbangan dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan pendapatan daerah dalam rangka desentralisasi.

Strategi keuangan daerah meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pendapatan utama, sehingga memungkinkan daerah untuk menjalankan tata kelola dan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya, serta meminimalkan ketergantungan pada subsidi pemerintah yang besar. Oleh karena itu, upaya peningkatan Pendapatan Daerah harus mempertimbangkan daerah dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan alternatif bagi belanja daerah, terutama belanja rutin. Oleh karena itu, setiap daerah ingin meningkatkan pendapatan daerah.

Keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kekayaan daerah (Pasal 1 angka 5 PP No. 58 Tahun 2005). Menurut Basuki (2008) dalam PP No. 58 Tahun 2005, keuangan daerah meliputi :

1. Kewenangan untuk mengenakan pajak daerah, retribusi daerah, dan memberikan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan menyelesaikan pembayaran kepada pihak lain.
3. Pendapatan daerah.
4. Belanja daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola secara mandiri atau oleh entitas eksternal, meliputi sumber daya moneter, surat berharga, piutang, komoditas, dan hak-hak lain yang memiliki nilai moneter, termasuk aset yang dipisahkan dalam perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak ketiga yang diatur oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum. (Aaron, 2012).

APBD merupakan dana daerah yang sepenuhnya dibiayai oleh daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh DPRD dan peraturan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, DPRD mengutamakan pengawasan keuangan daerah.

Kestabilan terhadap Kegiatan Ekonomi

Upaya pemerintah untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Kesadaran akan belanja pemerintah.
2. Peningkatan pajak baik dari segi jumlah maupun volume.
3. Menciptakan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan, fungsi, dan penggolongan APBD (Pasal 16) diuraikan sebagai berikut:

1. APBD merupakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah.
2. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
3. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sumber pendapatan lain yang sah.
4. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membelanjakan uang di daerah, yang dianggap sebagai kerugian dalam nilai aset bersih. Pada saat yang sama, rincian pengeluaran daerah diubah agar sesuai dengan struktur perangkat daerah dan lembaga teknisnya dalam hal pengorganisasiannya. Fungsi data pengeluaran daerah meliputi penegakan hukum, keselamatan publik, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, perumahan dan infrastruktur publik, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan layanan publik.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk stabilitas daerah bergantung pada tahapan pelaksanaan subsistem MP3ED Kabupaten Bengkalis 2013-2027 yang melibatkan pemangku kebijakan, dunia usaha, serta organisasi masyarakat desa dan kota. Hal ini mendorong pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis. Pemantauan tren ekonomi makro dan dinamika pembangunan di Kabupaten Bengkalis sangat penting untuk percepatan dan perluasan pertumbuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap level memerlukan arahan dan rekomendasi yang berbeda. Permasalahan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Uang Asli Daerah adalah uang daerah yang dihimpun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu komponen penting dari desentralisasi fiskal adalah peningkatan PAD daerah, atau kewenangan perpajakan. Undang-undang melarang peningkatan pendapatan asli daerah karena dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang merugikan layanan publik dan perekonomian. Pendapatan asli daerah bergantung pada pembangunan ekonomi, terutama pada sektor industri dan jasa. Kedua sektor ini merupakan penyumbang pendapatan asli daerah terbesar. Asumsi pertumbuhan ekonomi daerah dapat digunakan untuk menghitung pendapatan asli daerah dan pertumbuhan tahunan.

Pendapatan daerah bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan badan usaha milik negara, dan sumber lainnya. Statistik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 meliputi:

Tabel 1. APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	APBD	Jumlah	Sumber
1	Pendapatan Daerah	Rp3.626.160.805.381	pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2	Belanja Daerah	Rp4.135.901.040.461	belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
3	Pembiayaan Daerah	Rp509.740.235.080 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp539.740.235.080 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000.	-

Sumber: LKPJ APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Belanja daerah dalam APBD didasarkan pada data pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis dan dimaksudkan untuk membantu pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat. Belanja daerah bersifat administratif dan publik. Belanja publik bersifat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat..

SIMPULAN

Stabilitas ekonomi merupakan faktor kunci dalam menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai stabilitas ekonomi, diperlukan keseimbangan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Penerapan regulasi yang tepat di sektor perbankan dan penguatan sektor industri dan jasa sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mencegah krisis ekonomi akibat inflasi yang tinggi, yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pendapatan nasional.

Kabupaten Bengkalis mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintahan dan pembangunan daerah. Reformasi fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap subsidi pemerintah pusat. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan perusahaan dapat meningkatkan PAD.

Dalam pengelolaan anggaran, belanja daerah dalam APBD Kabupaten Bengkalis dialokasikan untuk memperlancar kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemajuan masyarakat. Belanja tersebut terbagi menjadi belanja peralatan dan belanja publik, yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Secara keseluruhan, untuk mencapai kestabilan ekonomi di Kabupaten Bengkalis, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal yang cermat, pengelolaan keuangan yang transparan, serta percepatan pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Wildavsky dan Naomi Caiden. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta. Metapena Cosultindo.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Riau dalam Angka*. BPS Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2010. *Profil Wilayah Kabupaten Bengkalis*. Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Basuki. 2008. Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Kompak. STIE Yo. Yogyakarta*. 127-146.
- David, F.R. 2011. *Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta : Selemba Empat.
- Fajriansyah, Rizky dan Isnati. 2019. *Menejemen Strategik*. Penerbit Andi. Halim, Abdul. (2004). *Akutansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Lagesang, D. Gustaaf B T dan Desy T. 2021. Strategi pemerintah desa dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat desa di tengah pandemi covid 19 (suatu studi di desa pusunge kecamatan tabukan Utara kabupaten kepulauan sangihe). *JAP*. 3(3) :93-98.
- Maria, C.P. Salmin, D. Rully, M. 2021. manajemen strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa Motoling dua kecamatan motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 7. No 103. 2020.
- Maryanti, S., Netrawati, I. O., & Faezal, F. (2019). Menggerakkan Perekonomian Melalui Pemulihan Usaha Dan Industri Mikro Kecil Menengah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat. *Media Bina Ilmiah*, 14(4), 2321